KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pelik : Seleksi Hakim "Ad Hoc"
Tanggal : Minggu, 18 Juli 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Pelik, Seleksi Hakim "Ad Hoc" Tip

Memperkuat benteng pertahanan terakhir perlawanan terhadap korupsi di lembaga peradilan bukanlah perkara mudah. Jika salah menempatkan orang, benteng tersebut bisa keropos dari dalam.

usana Rita Kumalasanti



Suasana uji kelayakan dan kepatutan *(fit and proper test)* calon hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung yang digelar di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/1/2021).

Di tengah korupsi yang merajalela, melibatkan kepala desa hingga penggi semacam menteri, hakim *ad hoc* tindak pidana orupsi yang berintegritas teradap pemberantasan korupsi alah hal mutlak. Jika yang ipilih sebaliknya, proses hukum sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pusan tingkat pertama dan anding yang barang kali sah dilakukan secara luar iasa bisa lenyap tak berbekas.

Peran Komisi Yudisial (KY), shagai satu-satunya lembaga engusul calon hakim agung an hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi (tipikor) di Mahamah Agung (MA), sungguh gnifikan. Kontribusi KY menentukan arah/sikap MA dalam pemberantasan korupsi.

Jika para wakil Tuhan yang a di MA saat ini banyak merugangi hukuman koruptor, ublik dapat meminta pernggungjawaban ke KY. "Itu) anar belaka," ungkap Ketua Y periode 2013-2015 Suparan Marzuki, saat dihubungi, amis (15/7/2021).

Suparman bahkan mengaku dak tidur jika memikirkan hasim agung hasil pilihan KY ang ternyata tidak sesuai degan harapan awal. Informasi engenai hakim bersangkutan rkadang muncul belakangan telah calon menjabat.

Ia mengakui, masalah utama dalam seleksi calon hakim gung dan hakim *ad hoc* adah pada aspek kualitas, meskup integritas para calon. anyak calon berguguran di hapan ini karena tidak menenuhi kualifikasi. Kalaupun dos dalam seleksi KY, calon rekendala di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang beberapa kali tak meloloskannya.

Saat ini, MA menghadapi risis hakim *ad hoc* tipikor untuk menangani perkara kasasi an peninjauan kembali (PK). ima hakim *ad hoc* tipikor di MA akan mengakhiri masa tusnya pada 22 Juli mendang. Mereka adalah Krisna Harahap, Moh Askin, Abdul atief, Leopold Hutagalung, an Syamsul Rakan Chaniago.

Tersisa tiga hakim *ad hoc* pikor di MA, yaitu Sinintha uliansih (hasil seleksi di DPR anuari 2021) serta Ansori dan gus Yunianto (hasil seleksi di PR pada Januari 2020).

Sejak Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada 004, baru ada empat angkatan hakim *ad hoc* tipikor di MA. Angkatan pertama hasil seleksi Panitia Seleksi bentukan Ketua MA pada 2004, yaitu Krisna Harahap, Hamzad Hamid, dan MS Lumme. Pada 2005, MA kembali menyeleksi hakim *ad hoc* tipikor untuk MA dan meloloskan tiga orang, yaitu Leopold Hutagalung, Oljak Parulian Sinanjuntak, dan Suphian Martahaya.

Sejak saat itu, tidak pernah ada seleksi kembali hingga pada akhirnya seleksi hakim *ad hoc* tipikor digelar pada 2016 oleh KY. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY menggamanatkan bahwa seleksi calon hakim *ad hoc* di MA dimasukkan dalam kewenangan KY, menambah kewenangan sebelumnya menyeleksi calon hakim agung.

Pada 2016, KY mengirim empat calon hakim *ad hoc* tipikor ke DPR untuk mendapat persetujuan. Naman, tak satu pun hasil seleksi KY diamini DPR. Seleksi berikutnya pada 2019 dan 2020 menghasilkan masing-masing dua dan empat hakim *ad hoc* tipikor yang diusulkan ke DPR. Lagi-lagi jumlah calon yang disetujui DPR tak sesuai harapan, yakni satu hakim *ad hoc* tipikor pada 2019 dan dua hakim *ad hoc* tipikor pada 2020. Padahal, kebutuhan MA dari tiga kali seleksi itu adalah 12 hakim *ad hoc* tipikor.

Dari tiga seleksi yang dilakukan KY, ada 53 orang mendaftar hakim *ad hoc* tipikor pada seleksi 2016, pada 2019 hanya 50 orang, dan pada 2020 ada 303 pemutar. Bandingkan dengan seleksi calon hakim agung yang digelar KY, ada 141 pendaftar memperebutkan delapan posisi hakim agung dalam seleksi pada 2021.

Dari para pendaftar itu, jumlah yang lolos seleksi KY menyasar tajam. KY menerapkan empat tahap seleksi mulai dari administratif, kualitas, kesehatan dan kepribadian, hingga wawancara tahap akhir. Juru Bicara Komisi Yudisial Miko Ginting mengatakan, standar dan tahapan seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* tipikor di MA itu sama.

"Jika ada yang berbeda adalah kompetensi spesifik. Hakim *ad hoc* adalah hakim dengan keahlian perkara tertentu, tipikor atau hubungan industrial," ujar Miko.

Lantas, mengapa standar dan tahapan seleksi calon hakim *ad hoc* tipikor sama dengan calon hakim agung? Miko mengatakan, hal ini karena alasan rasional bahwa hakim agung dan hakim *ad hoc* tipikor akan berada pada majelis yang sama dalam satu perkara.

Masalah integritas

Kebanyakan calon berguguran di seleksi tahap kedua, yaitu seleksi kualitas. Seleksi ini mengukur tingkat kelimuan dan keahlian calon hakim *ad hoc* tipikor melalui tes obyektif di antaranya pembuatan karya tulis di tempat, studi kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta studi kasus hukum.

Menurut Suparman, Ketua KY periode 2013-2015 ini, masalah utama seleksi calon hakim ada pada aspek kualitas dan integritas calon. Kalaupun lolos di KY, kebanyakan terkendala di DPR yang menolak meloloskan calon.

"Jangankan hakim *ad hoc*, cari hakim agung saja sukar, banyak tidak memenuhi standar integritas. Yang lolos jadi hakim agung terkadang disnal oleh koleganya sendiri. Kok, si anu lolos? Saya jawab, KY hanya meloloskan orang yang hasil tesnya bagus dan tidak ada bukti kuat integritasnya bermasalah," ungkapnya.

Bukan mengapa Suparman mengaku tak bisa tidur jika informasi mengenai calon-calon yang diloloskan KY baru muncul belakangan. Informasi itu terkadang datang dari kolega calon itu sendiri. "Saya tanya kenapa baru *ngomong*? Ada yang bilang enggak enak, ada yang takut ketahuan sebagai pemberi info," ungkapnya.

Lantas, bagaimana hal tersebut tidak terdeteksi KY? Bukankah untuk menelusuri rekam jejak calon hakim, KY melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta lembaga-lembaga lain.

Menurut Suparman, informasi yang disampaikan PPATK, misalnya, tidak banyak membantu. PPATK pun kesulitan karena perbuatan seperti penerimaan uang dari pihak lain dilakukan secara variatif. "Ada yang pakai rekening orang lain, ada yang pakai tunai, dan seterusnya," ujarnya.

Arsul Sani, anggota Komisi III yang ikut menguji kelayakan dan kepatutan calon hakim di DPR, mengungkapkan hal serupa. Ini terjadi ketika DPR melakukan *fit and proper test* terhadap calon hakim *ad hoc* tipikor yang diusulkan KY beberapa waktu lalu.

Menurut dia, calon hakim *ad hoc* tipikor yang diajukan KY kerap lupa bahwa di masa lalu mereka pernah berhadapan dengan anggota DPR yang berprofesi sebagai advokat atau pengacara. Para advokat itu, misalnya, pernah mengalami pengalaman tidak enak terhadap calon hakim tersebut yang meminta atau menerima sesuatu dari pihak beperkara. Saat ditanya apakah pernah menerima sesuatu, mereka mengatakan tidak pernah. Dengan sendirinya, kandidat yang berbohong akan tercoret dari daftar persetujuan DPR.

Selain itu, DPR juga menjaring masukan-masukan yang tidak terjaring di KY dari masyarakat. Informasi bisa didapatkan dari konstituen. "Saya itu sudah 25 tahun jadi advokat, tahu hakim-hakim nakal. Kami tahu pengacara ini kalau beperkara selalu menang jika ditangani hakim ini. Otomatis (hakim itu) akan dicoret dari persetujuan DPR," kata Arsul.

Saat menjabat, hakim *ad hoc* tipikor terpilih pun menghadapi tantangan di bidang peradilan tertinggi di Indonesia itu. Krisna Harahap yang menjabat sebagai hakim *ad hoc* tipikor sejak 2004 dan akan berakhir pada 22 Juli mendatang mengungkapkan, beginya hakim *ad hoc* sering dianggap